BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

3.1.1 Sejarah Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Negara Indonesia adalah satu diantara negara yang sedang berkembang di dunia, dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. satu diantaranya adalah pembangunan dibidang teknologi informasi sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan bentuk kepanjangan birokrasi dari pemerintah pusat dibentuklah dinas-dinas yang bertanggung jawab kepada bagian-bagian tertentu satu diantaranya pengelolaan komunikasi dan informatika, atau lebih jelasnya dinas ini disebut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Pada awalnya, Diskominfo adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang merupakan kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan Puslahta di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya proyek pembangunan komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Barat Nomor:294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan Kantor Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di Jalan Taman Sari No.57 Bandung.

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor Puslahta dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor:2 Tahun 1981 tentang pembentukan Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor:3 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan Puslahta di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan Puslahta di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedududkan organisasi menjadi non struktural. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin computer IBM S-370/125 seperti:IPTN, PJKA, ITB, Dan pihak Swasta lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak Puslahta didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor:21 Tahun 1992 Organisasi

Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam satu diantara pasal Surat Keputusan Gubernur No.21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Puslahta dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya, pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 Tahun 1992 tentang pembubaran Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor:22 Tahun 1992 tentang pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor:5 tahun 1992 tentang pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor:5 Tahun 1992 tentang pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor:B-606/I/93 perihal persetujuan pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tin gkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keluarnya surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor:4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa

Barat dan No.5 tahun 1994 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:59 Tahun 1995 tentang pengesahan Peraturan Daerah Nomor:4 dan Nomor:5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu unit pelaksana daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor:16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang lembaga teknis daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat Bapesitelda sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor:22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor:5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No.294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No.2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia ;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No.16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat.

Nomenklatur :

Bapesitelda adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika .

Selanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Provinsi Jawa Barat diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan *platform* dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian *Jabar Cyber Province* Tahun 2012.

3.1.2 Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat

Setiap organisasi pasti memiliki visi, baik itu bertujuan mencari keuntungan ataupun hanya sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. visi dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki pengertian pandangan terhadap suatu masalah.

Diskominfo Provinsi Jawa Barat memiliki visi: "terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasi dan Informatika yang efektif dan efisien".

Sama halnya dengan visi, maka setiap organisasi tersebut pasti memiliki misi dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut beberapa misi dari Diskominfo Provinsi Jawa Barat :

1. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumberdaya aparatur bidang komunikasi dan informatika;
2. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana komunikasi dan informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakan diseminasi informasi;
4. Mewujudkan layanan *online* dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis teknologi Informasi dan komunikasi;
5. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa barat.

3.1.3 Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Provinsi Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat Diskominfo, yang berlokasi di Jalan Tamansari No.55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga

kebijakan, baik hubungannya ke dalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan *platform* dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian *Jabar Cyber Province* Tahun 2012.

Berdasarkan Perda tersebut, maka sruktur organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai berikut di bawah ini.

1. Kepala

2. Sekretariat, membawahkan:

a. Sub.Bagian Perencanaan dan Program

b. Sub.Bagian Keuangan;

c. Sub.Bagian Kepegawaian dan Umum;

3. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahkan:

a. Seksi Pos dan Telekomunikasi;

b. Seksi Monitoring dan Penetiban Spektrum Frekuensi;

c. Seksi Standarisasi Pos Dan Telekomunikasi;

4. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan:

a. Seksi Komunikasi Sosial ;

b. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Pemerintah dareah;

c. Seksi Penyiaran Dan Kemitraan Media;

5. Bidang Telematika, membawahkan:

a. Seksi Pengembangan Telematika;

b. Seksi Penerapan Telematika;

c. Seksi Standarisasi dan Monitoring Evaluasi Telematika

6. Bidang Pengolahan Data Elektronik, membawahkan:

a. Seksi Kompilasi Data ;

b. Seksi Integrasi Data ;

c. Seksi Penyajian Data dan Informasi.

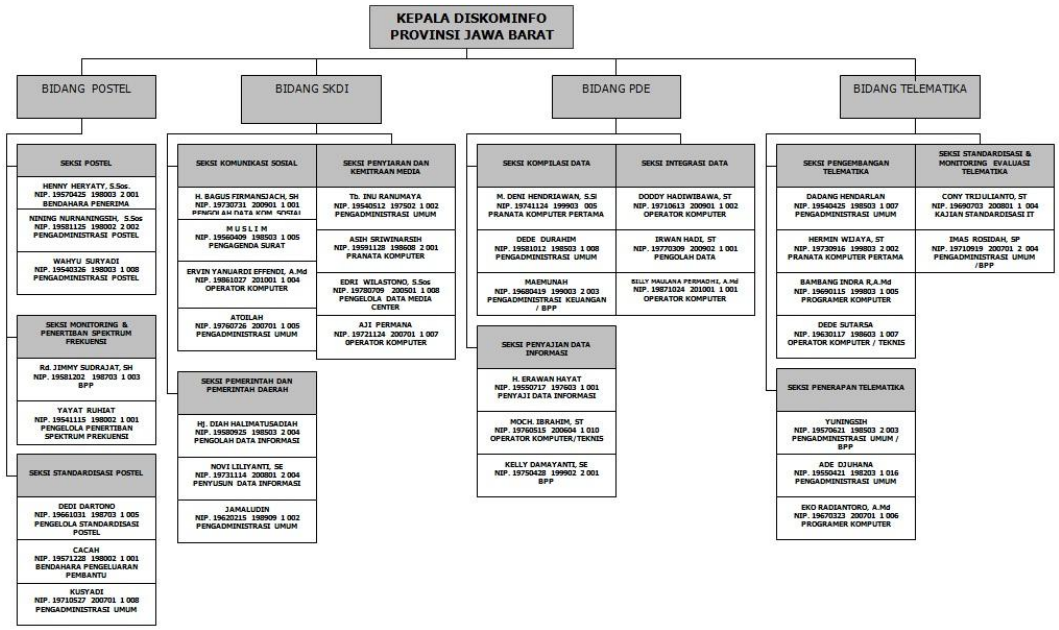
7. Balai LPSE:

a. Tata Usaha LPSE

b. Layanan Informasi LPSE

c. Dukungan dan Pendayagunaan TIK LPSE

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Diskominfo Provinsi Jawa Barat



(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Berdasarkan struktur organisasi di atas dan juga hasil observasi peneliti di lapangan, pengelolaan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat tidak terpaku pengelolaanya oleh satu bidang saja, namun terintegritas antara

bidang yang satu dengan bidang yang lain. Namun secara mayoritas dapat dijelaskan bahwa bidang Bidang Sarana Komunikasi Dan Diseminasi Informasi, dan Bidang Pengolahan Data Elektronik lah yang memiliki porsi lebih besar dalam pengelolaan ruang internet publik.

Adapun data aparatur Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, lebih jelasnya digambarkan dalam tabel dan grafik berikut ini :

Tabel 3.1
Data Aparatur Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

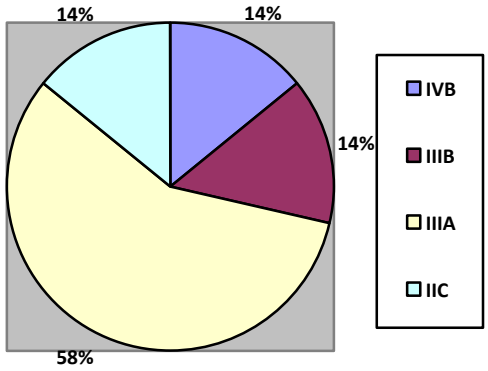
No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol TMT	Jabatan TMT	Pendidikan
Kepala Bidang				
1	Drs. Karso Saminurrahmat. M.M	Pembina Tingkat I/IV B	Kabid Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi	S-2 Manajemen Proyek
Seksi Komunikasi Sosial				
1	H. Bagus Firmansah. S.H	Penata Muda/III A	Bendahara Pengeluaran	S1 Hukum Unisba
2	Ervin Yanuardi Effendi. A,M.d	Pengatur/II C	Operator Komputer	D-III
3	Atoilah	Penata Muda/III A	Pengadministrasi Umum	D-I MMTC Yogya Penyiaran
Seksi Penyiaran dan Kemitraan Media				
1	Edri Wilastono, S.Sos	Penata Muda Tingat I/III B	Pengolahan Data Media Center	S1
2	Aji Permana	Penata Muda/III A	Opertaor Komputer	D-I MMTC Yogya Penyiaran
Seksi Pemerintah dan Pemerintah Daerah				
1	Novi Lilianti, S.E	Penata Muda	Bendahara Pengeluaran	S1 Ekonomi Akuntansi

		Tingkat 1/III B	Pembantu	
2	Jamaluddin	Pengatur / II C	Pengadministrasi Umum	SMP

(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat 2012)

Dari tabel berikut, maka agar lebih jelas dan mudah difahami peneliti membuat grafik berdasarkan golongan dan pendidikan dari masing-masing aparatur Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.1
Kriteria Aparatur
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan



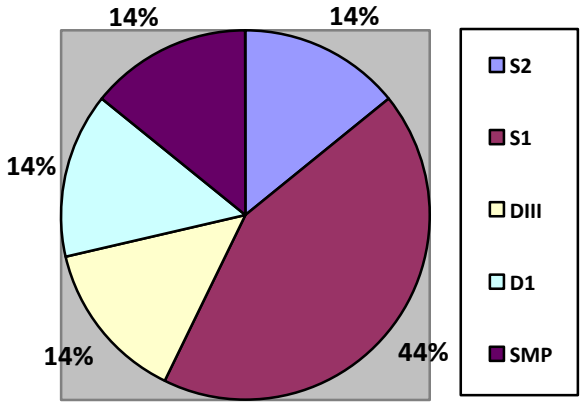
(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Berdasarkan grafik tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa aparatur Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Provinsi Jawa Barat mayoritas 58% nya adalah golongan III A. Grafik tersebut dimaksudkan agar menjadi gambaran bagi peneliti bahwa didominasinya Bidang SKDI dengan golongan III A akan merujuk kepada masa kerja aparatur-aparatur tersebut berdasarkan golongan, pengalaman aparatur tersebut dalam melaksanakan kebijakan dan juga masalah gaji (*salary*) yang secara langsung

maupun tidak langsung dapat berdampak secara ekonomi, sosial dan politik yang ada. Uraian-uraian diatas pula tentunya akan mendukung terhadap pembahasan penelitian dan teori yang peneliti gunakan.

Selanjutnya, selain peneliti membuat grafik dengan mengelompokan aparatur sesuai golongan, peneliti lebih lanjut mengelompokan aparatut bidang Bidang SKDI Diskominfo Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendidikan. Adapun grafiknya sebagai berikut:

Grafik 3.2
Kriteria Aparatur
Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan



(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Berdasarkan grafik tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa aparatur Bidang Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI) Diskominfo Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendidikannya, mayoritas 44% nya adalah pendidikan S1. Selanjutnya, grafik tersebut akan merujuk kepada masalah sumberdaya aparatur bidang SKDI tersebut dalam pelaksanaan kebijakan ruang internet publik, karena bagaimanapun juga masalah pendidikan adalah masalah

yang sangat penting bagi perkembangan aparatur yang ada, karena secara langsung akan berdampak kepada tingkat pengetahuan dan kinerja daripada aparatur tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan agar sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, setelah menggambarkan aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat Bidang SKDI dalam bentuk tabel dan grafik, maka bidang lain yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan ruang internet publik adalah bidang Pengolahan data elektronik yang akan peneliti gambarkan dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut.

Tabel 3.2
Data Aparatur Bidang Pengolahan Data Elektronik

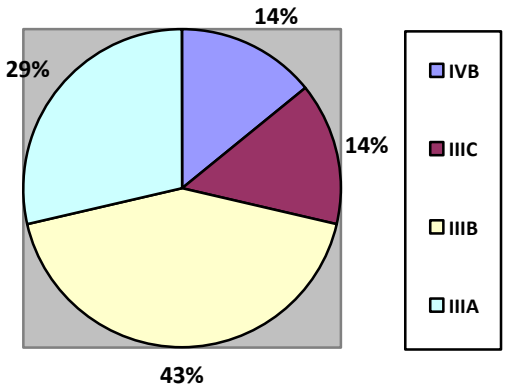
Kepala Bidang				
1	Drs. Kiagus Denny Sopian, M.Si	Pembina Tingkat 1/IV B	Kabid Pengolahan Data Elektronik	S2 Magister Sains Ilmu Adm Unpas
Seksi Kompilasi Data				
1	H. Deni Hendriawan, S.Si	Penata / III C	Pranata Komputer Pertama	S1 Ilmu Komputer Unpad
2	Dede Durahim	Penata Muda Tingkat I / III B	Pengadmins trasi Umum	STM elektronik
3	Maemunah	Penata Muda Tingkat I / III B	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SMA.IPS
Seksi Integrasi Data				
1	Billy Maulana Permadhi, A.Md	Pengatur / II C	Operator Komputer	DIII
2	Irwan Hadi, S.T	Penata Muda/ III A	Pengolahan Data	S1 Komputer
Seksi Penyajian Data Informasi				
1	Kelly Damayanti, S.E	Penata Muda/ III A	Bendahara Pengeluaran	S1 Hukum Unisba

			Pembantu	
2	Mochammad Ibrahim, S.T	Penata Muda Tingkat 1 / III B	Administrator Sistem / Teknis	S1 Teknik Informatika

(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Dari tabel berikut, maka agar lebih jelas peneliti membuat grafik berdasarkan golongan dan pendidikan dari masing-masing aparatur Bidang Pengolahan Data Elektronik Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

Grafik 3.3
Kriteria Aparatur
Bidang Pengolahan Data Elektronik
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan



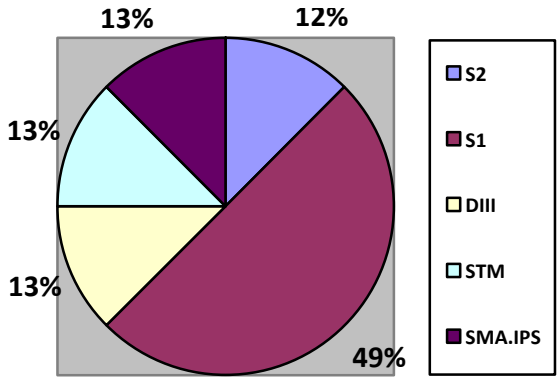
(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Berdasarkan grafik tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa aparatur Bidang Pengolahan Data Elektronik Diskominfo Provinsi Jawa Barat mayoritas 43% nya adalah golongan III B. Penjelasan tersebut menjadikan suatu gambaran bahwa dengan mayoritas golongan III B dalam pelaksanaanya akan merujuk kepada masa kerja aparatur-aparatur tersebut berdasarkan golongannya, pengalaman aparatur tersebut dalam melaksanakan kebijakan dan juga masalah gaji (*salary*) yang secara tidak langsung berdampak secara ekonomi, sosial dan

politik yang ada. Uraian-uraian diatas tentunya akan mendukung terhadap pembahasan penelitian dan teori yang peneliti gunakan

Selanjutnya, selain peneliti membuat grafik dengan mengelompokan aparatur sesuai golongan, peneliti lebih lanjut mengelompokan aparatut Bidang Pengolahan Data Elektronik Diskominfo Provinsi Jawa Barat berdasarkan pendidikan. Adapun grafiknya sebagai berikut:

Grafik 3.4
Kriteria Aparatur
Bidang Pengolahan Data Elektronik
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan



(Sumber : Bagian Kepegawaian Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2012)

Berdasarkan grafik tersebut peneliti mendapatkan gambaran bahwa aparatur Bidang Pengolahan Data Elektronik Diskominfo Provinsi Jawa Barat dengan mayoritas 49% nya adalah berpendidikan S1. penjelasan tersebut akan merujuk kepada masalah sumberdaya aparatur tersebut dalam pelaksanaan kebijakan ruang internet publik, karena bagaimanapun juga tingkatan pendidikan adalah masalah yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya bagi para pelayan publik, karena dengan pola pikir masyarakat yang semakin cerdas, kritis dan dinamis, secara langsung maupun tidak langsung tingkatan pendidikan dalam aparatur-aparatur terkait kebijakan ruang internet publik akan berdampak kepada tingkat

pengetahuan dan kinerja yang ditunjukan daripada aparatur tersebut dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankannya agar dapat mewujudkan tujuan dari kebijakan tersebut.

3.1.4 Ruang Internet Publik

Ruang internet publik adalah sebuah ruangan yang dibangun pada tahun 2010 yang menyediakan layanan internet gratis dan juga perpustakaan bagi masyarakat umum, khususnya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Ruang internet publik ini berukuran sekitar 5meter x 5meter, dan bertempat sebelah kanan sebelum pintu masuk kantor Diskominfo Provinsi Jawa Barat yang berada di Jalan Taman Sari No.55 Bandung dengan jadwal kunjungan setiap hari senin-sabtu dimulai pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore.

Fasilitas yang dapat digunakan di ruang internet publik ini adalah layanan internet gratis dengan 8 unit Personal *Computer*, Menggunakan jaringan internet dengan *Provider* Speedy, dengan Kecepatan Internet 1 MBps. Dan juga terdapat fasilitas lain yaitu perpustakaan.

Gambar 3.2
Kondisi didalam ruang internet publik

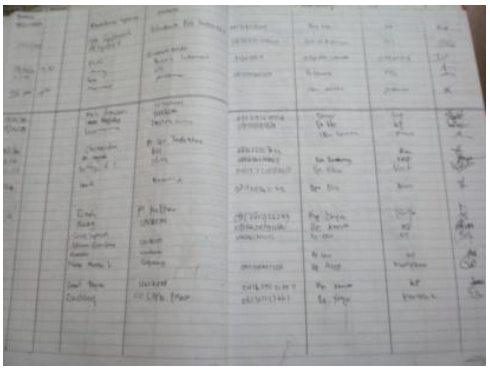




(Sumber : Studi Dokumentasi Peneliti di Ruang Internet Publik
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Masyarakat yang ingin menggunakan ruang internet publik ini pengunjung bisa datang langsung ke Diskominfo Provinsi Jawa Barat Jalan Taman Sari No.55 Bandung dan mengisi buku tamu yang telah disediakan. Pengisian buku tamu untuk waktu sekarang ini masih diisi secara manual, yaitu dengan mengisi nama, alamat, asal, dan tujuan sesuai dengan kolom yang sudah disediakan dalam buku tamu tersebut. Namun menurut informasi penjaga ruang internet publik tersebut, dalam waktu dekat pengisian buku tamu akan menggunakan sistem komputerisasi agar data pengunjung lebih tertata dengan rapi dan juga sebagai bentuk pemanfaatan kemajuan teknologi.

Gambar 3.3
Buku Tamu Pengunjung Internet Publik



(Sumber : Studi Dokumentasi Peneliti di Ruang Internet Publik Diskominfo Tahun 2013)

Selain internet gratis pengunjungpun dapat menikmati fasilitas lain yaitu disediakan majalah-majalah dan buku-buku seputar perkembangan teknologi informasi, berita seputar Provinsi Jawa Barat, Undang-undang yang berkaitan dengan teknologi informasi, dan buku-buku lain yang bertemakan umum.

Gambar 3.3
Fasilitas perpustakaan di Ruang Internet Publik





(Sumber : Studi Dokumentasi Peneliti di Ruang Internet Publik
Diskominfo Provinsi Jawa Barat Tahun 2013)

Penjelasan yang sudah peneliti sampaikan diatas menjadikan gambaran bahwa fasilitas-fasilitas di ruang internet publik yang disediakan secara gratis kepada masyarakat di Jawa Barat tersebut merupakan satu diantara wujud pelayanan publik dan upaya pencapaian visi dan misi Diskominfo Provinsi Jawa

Barat. Walaupun jika dilihat dari pengamatan peneliti di lapangan dan dilihat dari buku tamu masih minimnya pengunjung yang datang, sehingga hal tersebut menjadi bahan kajian dan perhatian bagi peneliti sendiri, aparatur Diskominfo Provinsi dan juga Masyarakat Provinsi Jawa Barat.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang tertentu maupun gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih dalam hal ini lebih jelasnya ditujukan kepada aparatur dan hubunganya kepada masyarakat dalam kebijakan ruang internet publik.

Peneliti menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang Implementasi Kebijakan Ruang Internet Publik yang di dasarkan pada Inpres No.3 Tahun 2003 di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, serta mendeskripsikan sejumlah konsep yang berkenaan dengan masalah internet publik tersebut. Berdasarkan metode tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan secara kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat sebagai objek yang diteliti mengenai tingkah laku individu atau kelompok, mamahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

3.2.1 Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai macam data untuk memperjelas penyusunan skripsi ini, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

   Penggunaan studi pustaka sangat dibutuhkan peneliti untuk menambah wawasan berkenaan dengan masalah dan teori implementasi kebijakan yang digunakan. Studi pustaka merupakan pengambilan data berupa referensi berdasarkan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan dan ruang internet publik. Studi pustaka ini didapat dari buku, artikel dan dokumentasi.

2. Wawancara

   Penggunaan studi wawancara sangat dibutuhkan peneliti dalam mencari data-data lainnya selain data konkrit yang sudah ada, dengan bertanya secara langsung kepada aparatur terkait dan juga masyarakat yang menggunakan ruang internet publik.

3. Observasi

   Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara observasi yaitu peneliti melihat langsung ke lapangan dengan pengamatan dan mencatat terhadap gejala-gejala yang diteliti yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Ruang Internet Publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

4. *Internet Searching* (Pencarian Data di Internet)

   Peneliti melakukan pencarian data melalui internet dengan cara mengunjungi situs-situs atau website yang sifatnya personal dan dapat

memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Ruang Internet Publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

5. Studi Dokumentasi

   Dokumentasi sangat penting, sebagai elemen tambahan dan memperjelas daripada suatu penelitian, dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat seperti fasilitas yang tersedia, bagaimana proses pemanfaatan oleh masyarakat.

3.2.2 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive*. Teknik ini ditunjukan dengan Peneliti memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan yaitu ditujukan kepada aparatur pelaksana yang bertanggung jawab secara struktural organisasi dalam mengelola ruang internet publik. Mereka yang dipilih pun harus dianggap kredibel untuk menjawab dan memberikan gambaran menganai masalah yang sedang dibahas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka aparatur yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
2. Aparatur Pengolahan data bidang Pengolahan Data Elektronik.
3. Petugas penjaga ruang internet publik.

Selanjutnya peneliti memilih masyarakat yang secara langsung menggunakan ruang internet publik dengan menggunakan teknik *accidental*. Teknik *accidental* ini dapat dijelaskan sebagai penentuan informan secara tidak sengaja atau secara acak. Karena masyarakat pengguna ruang internet publik tidak bisa dipastikan yang menggunakannya walau pada dasarnya adalah masyarakat Jawa Barat.

Berdasarkan uraian tersebut, masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mahasiswa.
2. Wiraswasta.

Dua informan ini merupakan pihak yang berhubugan dengan ruang internet publik. Tujuan akhirnya adalah data yang didapatkan dapat bersifat objektif sehingga dapat terlihat apakah ruang internet publik ini masih layak digunakan atau diperlukan inovasi-inovasi lain agar internet publik ini dapat berjalan lebih optimal.

3.2.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Secara operasional teknik analisis data yang dilakukan mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian atau hubungan diantara bagian dalam keseluruhan.

Peneliti dalam menganalisis data, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data terlebih dahulu sebelum di interprestasikan artinya data diproses terlebih dahulu, kemudian memberikan gambaran serta mendeskripsikan dan menganalisis sejumlah konsep yang berkenaan dengan implementasi kebijakan ruang internet publik, setelah mendapatkan gambaran dari data yang telah peneliti kaji, maka peneliti menarik kesimpulan dari data tersebut dalam hal ini mengenai implementasi kebijakan ruang internet publik di Diskominfo Provinsi Jawa Barat berdasarkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003.

3.2.4 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah ruang internet publik yang terdapat di Dinas komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat yang bertempat di Jalan Taman Sari No.55 Bandung.

Tabel 3.3
Jadwal Penelitian

Kegiatan / Waktu	Tahun 2013						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul
Tahap Awal							
1. Observasi awal	■	■					
2. Penyusunan dan Bimbingan Bab I, II, III	■	■					
3. Seminar Usulan Penelitian			■				
Tahap Pelaksanaan							
1. Observasi Lapangan				■			
2. Wawancara					■	■	■
Tahap Akhir							
1. Penyusunan dan Bimbingan Bab IV, V					■	■	■
2. Sidang Skripsi							■